



**PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

Oleh:

Nenik Woyanti, SE

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG 2003**

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Pemurah, penelitian tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil di Propinsi Jawa Tengah ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan penelitian ini menyajikan sembilan bab. Bab pertama berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, manfaat dan ruang lingkup penelitian. Bab kedua berisi metodologi penelitian, bab ketiga berisi tentang Pokok Kebijakan Pembinaan Industri, bab keempat berisi tentang gambaran umum sektor industri di Jawa Tengah, kelima berisi tentang Karakteristik industri kecil dan menengah, bab keenam berisi tentang stratifikasi industri, bab ketujuh berisi tentang potensi, kendala, kekuatan, kelemahan, dan peluang pengembangan industri kecil dan menengah, bab kedelapan berisi tentang Rencana Induk Pembinaan dan Pengembangan IKM, dan bab kesembilan berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi.

Kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran dan keberhasilan penulisan laporan ini, mulai perancangan hingga penulisan laporan, saya ucapkan terima kasih.

Saya berharap, laporan ini dapat bermanfaat sebagai bahan acuan dalam rangka pembuatan kebijakan bagi pihak-pihak yang terkait.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR

BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	i - 1
1.2	Maksud Dan Tujuan	i - 5
1.3	Manfaat Kegiatan	i - 5
1.4	Ruang Lingkup Kegiatan	i - 5
1.5	Sistematika Laporan	i - 6
BAB II	METODE PENELITIAN	
2.1	Lokasi Penelitian	ii - 1
2.2	Jenis Data	ii - 1
2.3	Teknik Pengambilan Sampel dan Jumlah Sampel	ii - 2
2.4	Analisis Data	ii - 4
BAB III	POKOK KEBIJAKAN PEMBINAAN INDUSTRI	
3.1	Kebijakan Nasional Pembinaan Industri	iii - 1
3.2	Kebijakan Propinsi Jawa Tengah dalam Pembinaan Industri	iii - 4
BAB IV	GAMBARAN UMUM SEKTOR INDUSTRI JAWA TENGAH	
4.1	Jenis Industri	iv - 1
4.2	Tenaga Kerja	iv - 5
4.3	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Jawa Tengah	iv - 10
BAB V	KARAKTERISTIK INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	
5.1	Kewirausahaan	v - 1
5.2	Sumber Daya Manusia	v - 5
5.3	Pemasaran	v - 10

5.4	Produksi	V - 15
5.5	Keuangan	V - 19
5.6	Kelemahan Materi Pelatihan	V - 23
5.7	Materi Pelatihan Yang Diinginkan	V - 25
5.8	Bentuk Penyelenggaraan Pelatihan	V - 27
BAB VI	STRATIFIKASI INDUSTRI	
6.1	Stratifikasi Yang Ada	VI - 1
6.2	Stratifikasi Yang Diusulkan	VI - 2
BAB VII	POTENSI DAN KENDALA PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	
7.1	Kekuatan Dan Kelemahan	VII - 1
7.2	Peluang Dan Kendala	VII - 7
BAB VIII	RENCANA INDUK PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	
8.1	Materi Pembinaan dan Pengembangan	VIII - 2
8.2	Bentuk Pembinaan dan Pengembangan	VIII - 6
8.3	Pelaksana Pembinaan dan Pengembangan	VIII - 9
8.4	Tolok ukur Keberhasilan	VIII - 12
BAB IX	PENUTUP	
9.1	Simputan	IX - 1
9.2	Rekomendasi	IX - 2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penyebaran Sampel Menurut Stratifikasi IKM dan Lokasi	II - 1
Tabel 2.2	Penyebaran Sampel Menurut Kelompok Industri dan Stratifikasi	II - 5
Tabel 4.1	Jumlah Perusahaan IKM Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 1995-2000	IV - 4
Tabel 4.2	Tenaga Kerja yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Lapangan Usaha di Jawa Tengah 1995-2000	IV - 8
Tabel 4.3	Jumlah Tenaga Kerja pada IKM Jawa Tengah 1995-2000	IV - 9
Tabel 4.4	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 1993 Jawa Tengah, 1995-2000	IV - 12
Tabel 4.5	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar harga Konstan 1993 Jawa Tengah, 1995-2000	IV - 12
Tabel 4.6	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 1993 Jawa Tengah, 1995-2000	IV - 13
Tabel 5.1a	Sikap Pengusaha Terhadap Perbaikan dan Inovasi Produk, Berdasarkan Kelompok Industri	V - 3
Tabel 5.1b	Keberanian Pengusaha Melakukan Spekulasi Pada hal Baru Dalam Usaha, Berdasarkan Kelompok Industri	V - 3
Tabel 5.1c	Optimisme Pengusaha Dalam Menghadapi Kesulitan Dan Hambatan Usaha, Berdasarkan Kelompok Industri	V - 4
Tabel 5.1d	Curahan Waktu Pengusaha Untuk Memikirkan Pengembangan Usaha, Berdasarkan Kelompok Industri	V - 4
Tabel 5.2a	Perencanaan Dalam Penerimaan Tenaga Kerja Berdasarkan Kelompok Industri	V - 6
Tabel 5.2b	Pembagian Kerja Dalam Perusahaan , Berdasarkan Kelompok Industri	V - 7
Tabel 5.2c	Pemberian Penghargaan Materi/Non Materi, Berdasarkan Kelompok Industri	V - 7
Tabel 5.2d	Pelatihan / Pengembangan Tenaga Kerja Berdasarkan Kelompok Industri	V - 8
Tabel 5.2e	Jumlah Tenaga Kerja Perusahaan Berdasarkan Kelompok Industri	V - 8

Tabel 5.2f	Kualitas Tenaga Kerja Perusahaan Berdasarkan Kelompok Industri	V - 9
Tabel 5.3a	Jangkauan Pemasaran Perusahaan Berdasarkan Kelompok Industri	V - 11
Tabel 5.3b	Pangsa Pasar yang dikuasai Perusahaan Berdasarkan Kelompok Industri	V - 12
Tabel 5.3c	Pertumbuhan Pasar Yang Dicapai Perusahaan, Berdasarkan Kelompok Industri	V - 12
Tabel 5.3d	Kegiatan Promosi Yang Dilakukan Perusahaan Berdasarkan Kelompok Industri	V - 13
Tabel 5.3e	Saluran Distribusi Yang Dilakukan Perusahaan Berdasarkan Kelompok Industri	V - 13
Tabel 5.3f	Pemakaian Merk Untuk Produk Perusahaan, Berdasarkan Kelompok Industri	V - 14
Tabel 5.3g	Penggunaan Kemasan Untuk Produk Perusahaan, Berdasarkan Kelompok Industri	V - 14
Tabel 5.4a	Penerapan Quality Control Dalam Produksi, Berdasarkan Kelompok Industri	V - 16
Tabel 5.4b	Pemakaian Penelitian dan Pengembangan Berdasarkan Kelompok Industri	V - 16
Tabel 5.4c	Kualitas Bahan baku Yang Digunakan perusahaan, Berdasarkan Kelompok Industri	V - 17
Tabel 5.4d	Peralatan Industri Yang Digunakan, Berdasarkan Kelompok Industri	V - 17
Tabel 5.4e	Metode Produksi Yang Digunakan Perusahaan, Berdasarkan Kelompok Industri	V - 18
Tabel 5.4f	Penanganan Limbah perusahaan, Berdasarkan Kelompok Industri	V - 18
Tabel 5.5a	Modal Usaha Selain Tanah dan Bangunan, Berdasarkan Kelompok Industri	V - 20
Tabel 5.5b	Struktur Modal Yang Dimiliki Perusahaan, Berdasarkan Kelompok Industri	V - 20
Tabel 5.5c	Pemanfaatan Kredit Oleh Perusahaan, Berdasarkan Kelompok Industri	V - 21

Tabel 5.5d	Administrasi Keuangan Yang Dilakukan Perusahaan, Berdasarkan Kelompok Industri	V - 21
Tabel 5.5e	Pertumbuhan Laba Perusahaan, Berdasarkan Kelompok Industri	V - 22
Tabel 5.5f	Pembayaran Pajak Perusahaan, Berdasarkan Kelompok Industri	V - 22
Tabel 6.1	Usulan Stratifikasi Industri Kecil dan Indikatomya	VI - 5
Tabel 6.2a	Pertumbuhan, Usulan Stratifikasi Industri Kecil dan Indikatomya	VI - 10
Tabel 6.2b	Peningkatan, Usulan Stratifikasi Industri Kecil dan Indikatomya	VI - 12
Tabel 6.2c	Pengembangan, Usulan Stratifikasi Industri Kecil dan Indikatomya	VI - 13
Tabel 6.2d	Mandiri, Usulan Stratifikasi Industri Kecil dan Indikatomya	VI - 15
Tabel 6.2e	Modern, Usulan Stratifikasi Industri Kecil dan Indikatomya	VI - 17
Tabel 7.1a	Faktor-faktor Kekuatan dan Kelemahan pada Industri Makanan, Minuman dan tembakau	VII - 4
Tabel 7.1b	Faktor-faktor Kekuatan dan Kelemahan pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil	VII - 4
Tabel 7.1c	Faktor-faktor Kekuatan dan Kelemahan pada Industri Kulit dan produk Kulit	VII - 5
Tabel 7.1d	Faktor-faktor Kekuatan dan Kelemahan pada Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Bambu	VII - 5
Tabel 7.1e	Faktor-faktor Kekuatan dan Kelemahan pada Industri Barang Galian Bukan Logam	VII - 6
Tabel 7.1f	Faktor-faktor Kekuatan dan Kelemahan pada Industri Logam Dasar, Barang dari Logam	VII - 6
Tabel 7.1g	Faktor-faktor Kekuatan dan Kelemahan pada Industri Kertas dan Kimia	VII - 7
Tabel 7.2a	Faktor-faktor Peluang dan kendala pada Industri Makanan, Minuman dan tembakau	VII - 9
Tabel 7.2b	Faktor-faktor Peluang dan Kendala pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil	VII - 10

Tabel 7.2c	Faktor-faktor Peluang dan Kendala pada Industri Kulit dan produk Kulit	VII - 10
Tabel 7.2d	Faktor-faktor Peluang dan Kendala pada Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Bambu	VII - 11
Tabel 7.2e	Faktor-faktor Peluang dan Kendala pada Industri Barang Galian Bukan Logam	VII - 11
Tabel 7.2f	Faktor-faktor Peluang dan Kendala pada Industri Logam Dasar, Barang dari Logam	VII - 12
Tabel 7.2g	Faktor-faktor Peluang dan Kendala pada Industri Kertas dan Kimia	VII - 12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pikir Penyusunan Rencana Induk Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil di Jawa Tengah	II - 5
Gambar 8.1	Skema Penyusunan Materi Pembinaan dan Pengembangan	VIII - 5
Gambar 8.2	Skema Bentuk Pembinaan dan Pengembangan	VIII - 8
Gambar 8.3	Skema Pelaksana Pembinaan dan Pengembangan	VIII - 10
Gambar 8.4	Input Proses dan Output Pembinaan dan Pengembangan	VIII - 13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberadaan industri kecil dan menengah (IKM) yang merupakan bagian dari industri nasional pada hakekatnya tumbuh dari bawah, artinya, tumbuh dari dalam masyarakat itu sendiri, sebagai salah satu wujud dari perkembangan sosial-anthropologis dan kultural kehidupan masyarakat. Ketrampilan yang dibutuhkan oleh IKM untuk tumbuh dan berkembang berakar pada potensi yang ada pada masyarakat. Dengan kata lain, perkembangan masyarakat turut menyebabkan perkembangan IKM, misalnya : industri kecil batik adalah wujud dari bertumbuhnya kegiatan industri yang dilandasi oleh sosio kultur masyarakat tertentu. Heterogenitas masyarakat Indonesia menghasilkan berbagai kegiatan industri yang beraneka ragam sehingga membuat IKM bagaikan "warna" pelangi.

Di sisi lain, pemerintah menanggapi keberadaan dan perkembangan IKM melalui berbagai peraturan dan kebijakan yang dipandang bermanfaat bagi seluruh IKM. Dengan demikian IKM senantiasa dipandang sebagai suatu entitas yang harus dikembangkan dan dilindungi, karena dari IKM dapat ditarik manfaat bagi kehidupan masyarakat. Sebagai perwujudan perhatian pemerintah, pada tanggal 26 Desember 1995 Presiden RI telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Usaha Kecil sebagaimana yang tercantum dalam Bab I Ketentuan Umum adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Sementara itu, yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan, dan pengembangan sehingga Usaha Kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan

mandiri. Adapun yang dimaksud dengan Pembinaan dan Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Sayangnya, peraturan dan kebijakan pemerintah bagi IKM yang ada belum dapat menyentuh inti pokok permasalahan yang dihadapi IKM. Hal-hal yang menjadi kendala antara lain kebijakan pemerintah masih terlalu generalis sehingga tidak dapat mengatasi hal-hal yang spesifik. Padahal IKM membawa karakteristiknya masing-masing yang tidak dapat dipandang secara generalis. Hal tersebut di atas menunjukkan betapa perlunya IKM dikembangkan dengan mendasarkan pada variasi, karakteristik dan keragaman IKM.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomer 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, kriteria Usaha Kecil seperti yang tercantum pada Bab III tentang Kriteria Pasal 5 ayat 1 adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar);
- c. milik warga negara Indonesia;
- d. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
- e. berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Mengingat bahwa dalam kenyataannya nilai kekayaan bersih dari Usaha Kecil yang ada banyak yang kurang dari kriteria seperti yang tersebut di

atas, maka pemerintah menyadari sehingga pada Pasal 5 ayat 2 mensiratkan bahwa nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Terlepas dari kriteria tersebut di atas, IKM selalu dianggap sebagai entitas yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar terutama tenaga kerja yang kurang terdidik dan kurang terampil. Maka manakala muncul masalah sempitnya masalah lapangan pekerjaan formal yang mampu disediakan, IKM menjadi salah satu tumpuan harapan.

Selama ini hampir tidak ada koordinasi yang harmonis dalam penyusunan peraturan perundangan tentang IKM, termasuk dalam hal implementasi peraturan dan kebijakan pengembangan IKM. Tidak adanya koordinasi yang harmonis ini merupakan salah satu wujud dari tersumbatnya komunikasi antara pembuat kebijakan dan peraturan dengan IKM itu sendiri, termasuk masyarakat secara luas yang berkepentingan dengan IKM. Artinya tidak ada atau belum dibukanya "pintu" untuk interaktif dalam setiap penyusunan serta pemberlakuan kebijakan dan peraturan bagi IKM.

Berbagai latar belakang tersebut diatas menunjukkan secara tegas bahwa pembinaan, pengembangan serta keberpihakan pada IKM selama ini masih didasarkan pada suatu pemahaman bahwa IKM dapat diperlakukan secara umum (*gebyah uyah*). Kondisi faktual IKM berbeda-beda dan bersifat spesifik sehingga diperlukan perlakuan yang berbeda dalam hal pembinaan dan pengembangan untuk mengakomodasikan perbedaan-perbedaan yang ada pada IKM.

Upaya untuk melakukan pembinaan dan pengembangan yang efisien dan efektif terhadap IKM, telah dilakukan dengan melakukan stratifikasi berdasarkan strata yang dibangun dan disusun atas dasar kondisi konkrit IKM di Jawa Tengah. Penentuan stratifikasi akan mengakomodasikan spesifikasi (kekhasan) IKM yang pada gilirannya akan menjadi "potret" dari kondisi nyata IKM secara komprehensif sebagai dasar penyusunan kategori dan indikator strata IKM di Jawa Tengah.

Selama ini pembinaan IKM dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah maupun non pemerintah yang mempunyai komitmen dan kepentingan dalam mengembangkan IKM di Jawa Tengah. Pembinaan yang dilakukan melalui berbagai aspek yang dianggap relevan untuk dapat mengembangkan IKM. Ada instansi yang membina aspek teknologi, ada lembaga yang membina aspek permodalan dan terdapat sejumlah instansi dan lembaga lainnya yang membina aspek pemasaran, aspek kelembagaan dan bahkan secara berulang-ulang melakukan pembinaan aspek sumber daya manusia IKM dan sebagainya. Masing-masing instansi atau lembaga mendesain program pembinaannya secara khusus dengan harapan IKM binaannya dapat menjadi semakin berkembang dan memiliki daya saing kuat.

Namun maksud tersebut tidak dapat terwujud sepenuhnya sesuai dengan rencana yang diinginkan. Bahkan jauh lebih besar biaya yang harus dikeluarkan bila dibandingkan dengan manfaat yang dapat dirasakan oleh IKM binaan. Di lain pihak sering kali IKM justru menjadi "frustasi" karena pola dan program pembinaan yang diperoleh terasa saling "tumpang tindih", tidak konsisten dan berkesinambungan tanpa bisa dihindari oleh IKM itu sendiri. Kecenderungan masing-masing instansi dalam mengimplementasikan program-program pembinaannya lebih kuat didorong oleh langkah-langkah yang mencerminkan "egoisme" instansi. Cara tersebut menghasilkan pembinaan IKM yang dilakukan secara terkotak-kotak sehingga tidak bisa menumbuhkan sinergi antar program.

Menyikapi permasalahan dan kondisi riil yang ada pada industri kecil dan menengah maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah melalui Proyek Penataan Struktur Industri Kecil di Jawa Tengah Tahun 2001 melaksanakan kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Tahap Kedua yang merupakan kelanjutan dari kegiatan Penyusunan Pola Stratifikasi Industri Kecil dan Menengah di Jawa Tengah. Dengan demikian Rencana Induk Pengembangan dan Industri Kecil (RIPIIK-II) yang maksudkan untuk membuat pedoman pola pembinaan dan pengembangan IKM di Jawa Tengah tidak terlepas dari RIPIIK-I

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Penyusunan Rencana Induk Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah antara lain :

1. Menyediakan kategori dan indikator strata industri kecil dan menengah sesuai dengan kondisi nyata di Jawa Tengah secara tepat.
2. Menentukan stereotype pola pembinaan dan pengembangan bagi masing-masing strata yang sudah ditetapkan.
3. Menyediakan bahan masukan bagi pengambil kebijakan dan penyusun peraturan tentang IKM dalam pola pembinaan dan pengembangannya.

1.3. Manfaat Kegiatan

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari Penyusunan Rencana Induk Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah adalah :

1. Hasil kegiatan yang berbentuk strata IKM di Kabupaten/Kota akan dapat dijadikan sebagai "saringan" vertikal maupun horizontal dalam program-program pemberdayaan IKM.
2. Strata IKM dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam proses pemberdayaan IKM.
3. Terciptanya pola pembinaan dan pengembangan IKM bagi masing-masing strata untuk periode 5 tahun sampai dengan 10 tahun mendatang.

1.4. Ruang Lingkup Kegiatan

Penyusunan Rencana Induk Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil (RIPPIK) Jawa Tengah Tahap Kedua merupakan kelanjutan dari Kegiatan Penyusunan pola stratifikasi IKM yang merupakan kegiatan tahun Anggaran 2000. Secara garis besar, Penyusunan Rencana Induk Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil meliputi kegiatan yang mempunyai ruang lingkup sebagai berikut :

- a) Melakukan Evaluasi/Review atas Stratifikasi yang sudah disusun dalam RIPPIK I.

- b) Penentuan dan penetapan Stratifikasi dan Indikator dari hasil evaluasi/review yang telah dilakukan.
- c) Penyusunan pola pembinaan dan pengembangan menurut strata dan instansi yang kompeten

bahan masukan bagi pengambil kebijakan dan peraturan tentang IKM untuk pola pembinaan dan an

PIK Tahap Kedua mengacu pada hasil yang dicapai pada i Stratifikasi IKM pada RIPPIK I.

laporan

di Rencana Induk Pembinaan dan Pengembangan Industri gah di Jawa Tengah menyajikan sembilan bab. Bab I isi latar belakang studi, maksud dan tujuan dari kegiatan kegiatan dan ruang lingkup kegiatan.

Bab II membahas tentang metodologi, yang berisi ang lokasi penelitian, jenis data, teknik pengambilan a data.

Bab III, Pokok Kebijakan Pembinaan Industri, dibahas tentang Kebijakan Nasional Pembinaan Industri dan Kebijakan Propinsi Jawa Tengah dalam Pembinaan Industri.

Bab IV, Gambaran Umum Sektor Industri Jawa Tengah; pembahasannya difokuskan pada jenis industri, tenaga kerja yang terserap, dan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Jawa Tengah.

Bab V, Karakteristik Industri Kecil dan Menengah; dibahas karakteristik industri kecil dan menengah berdasarkan variabel dan indikatornya, yang meliputi kewirausahaan, sumber daya manusia, pemasaran, produksi, keuangan, kelemahan materi pelatihan yang pernah diberikan, materi pelatihan yang diinginkan para pelaku IKM, dan bentuk penyelenggaraan pelatihan yang dianggap ideal dan cocok bagi para pelaku IKM.

KI
338.7
W091

w091, Menik

Pembinaan dan pengembangan
nyan industri kecil di provinsi
Jawa Tengah. Menik W091.
Semarang: Pdt. Ekonomi Liris,
2003.

IX, 87p, Bbl. i 50 cm.

1. HANANEMEN - PERINDUSRI

Bab VI, Stratifikasi Industri; dibahas tentang stratifikasi yang sudah ada, dan stratifikasi yang diusulkan berdasarkan studi di lapangan.

Bab VII, Potensi dan Kendala Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. Pada bab ini dibahas tentang kekuatan dan kelemahan, dan Peluang dan Kendala dari IKM.

Bab VIII, Rencana Induk Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; yang berisikan tentang materi pembinaan dan pengembangan, bentuk pembinaan dan pengembangan, dan pelaksana pembinaan dan pengembangan.

Bab IX, Penutup; berisi tentang simpulan dari hasil pembahasan dan rekomendasi.